

Kebijakan Polandia Terhadap Pengungsi Dari Timur Tengah Pada Tahun 2015

Bagoes Fajar Putranto Ajie dan Ali Muhammad¹

Prodi Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This research discusses about Poland's policy in responding to the issue of refugees from Middle East in 2015 which occurred in European region. Poland is one of the countries that refuses refugees to enter their country. The purpose of this research is to analyze about the reason behind Poland's policy that reject refugees. Based on the previous research, researcher found that there are three factors that influence Poland in responding to refugee issue. The first factor is domestic policy, economic factors and international factors.

Keywords: *Poland, Foreign Policy, Refugee, European Union*

Pendahuluan

Polandia merupakan salah satu negara yang berada di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Ukraina, Belarus, Lithuania dan Rusia dibagian Timur. Kemudian, Ceko dan Slovakia di bagian Selatan. Jerman dibagian Barat dan Laut Baltik di Utara dan merupakan salah satu negara tujuan pengungsi yang berasal dari beberapa wilayah Eropa dan Asia. Pengungsi adalah seseorang yang terpaksa harus meninggalkan negaranya karena penganiayaan, perang maupun kekerasan (USA for UNHCR, 2017).

Salah satu fenomena gelombang pengungsi di tahun 2015 ialah gelombang pengungsi dari Timur Tengah khususnya Suriah. Banyaknya masyarakat Suriah yang

¹ Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Korespondensi: bagusfajarpaji@gmail.com

mengungsi ke Eropa akibat adanya konflik berkepanjangan antara rezim Bashar al-Assad dengan ISIS. Meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk pada tahun 2015 ke Eropa akibat kondisi Suriah yang belum stabil menjadikan gelombang pengungsi pada tahun 2015 sebagai gelombang pengungsi terbesar kedua setelah perang dunia ke-2 pecah.

Krisis pengungsi yang terjadi di wilayah Eropa muncul akibat banyaknya pengungsi yang ingin memasuki wilayah Eropa karena dipandang sebagai negara yang aman dan dapat menjamin kehidupan mereka dimasa mendatang. *Eurostat* mencatat adanya kenaikan permintaan pencari suaka yaitu sejumlah 626.065 orang pada tahun 2014 yang sebelumnya berjumlah 435.190 orang pada tahun 2013. Kebanyakan permintaan itu sendiri berasal dari Suriah (Eurostat, 2015).

Krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 silam mengakibatkan munculnya berbagai respon seperti penolakan dari berbagai negara di Eropa seperti Polandia, Hungaria, Slovakia dan lainnya. Serta respon baik seperti Jerman yang menerima pengungsi seutuhnya.

Diantara negara di Eropa yang menolak serta menerapkan kebijakan guna menekankan masuknya arus pengungsi dinegaranya, Polandia menjadi salah satu negara yang menyatakan menolak menerima pengungsi untuk masuk ke dalam negaranya. Namun sebelumnya, Polandia sendiri merupakan negara yang sangat ramah terhadap pengungsi maupun imigran yang ingin menetap ataupun hanya sekedar bekerja disana. Sebuah survey yang diadakan oleh *European Social Survey* pada tahun 2002 hingga 2012 menunjukkan bahwa Polandia menjadi negara yang pro terhadap

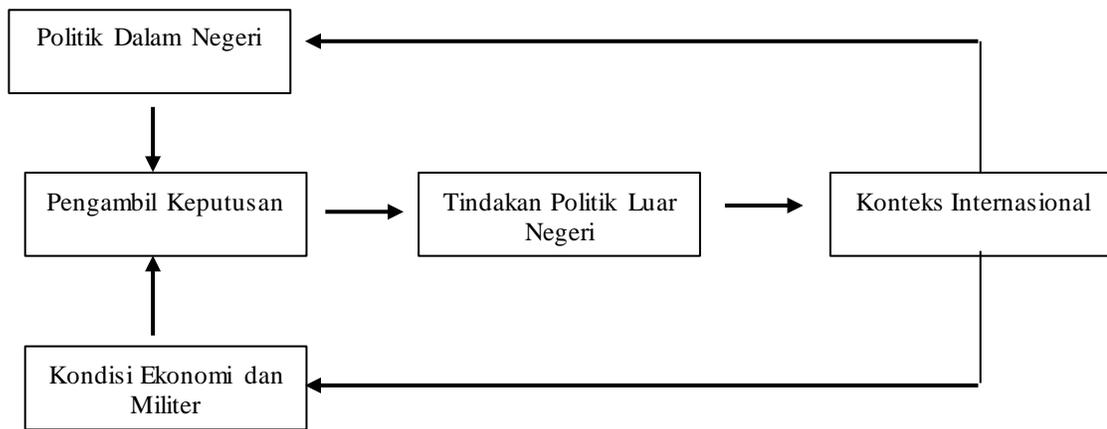
imigran di Eropa. Dimana Polandia menerima sebanyak 227,5 ribu imigran yang berasal dari Ukraina pada tahun 2011, disusul dengan Jerman sebanyak 84 ribu, Belarus sebanyak 83,4 ribu dan terakhir berasal dari Lithuania sebanyak 55,6 ribu orang (Kaczmarczyk, 2014). Namun, hal ini berubah ketika krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 silam. Polandia menyatakan untuk tidak menerima pengungsi ke negaranya saat berbagai negara menerima pengungsi untuk masuk ke negaranya.

Kerangka Teori

Penulis menggunakan satu teori untuk menganalisis lebih mendalam terhadap kebijakan Polandia tersebut. Teori yang digunakan yaitu Teori Politik Luar Negeri merupakan konsep yang digunakan oleh pemerintah atau negara dalam merespon terhadap isu tertentu maupun menjalin hubungan dengan pihak – pihak lain dalam lingkup eksternal ataupun dunia Internasional.

Menurut Abdur Moten dan Syed Islam politik luar negeri adalah serangkaian keputusan-keputusan pemerintahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dipanggung internasional. Istilah luar (*foreign*) dalam politik luar negeri merujuk pada apapun yang berada diluar batas negara tertentu dan istilah politik (*policy*) didefinisikan sebagai suatu petunjuk, pedoman, pembimbing pada tindakan yang dimaksudkan untuk menyadari tujuan suatu negara yang telah dirumuskan oleh negara itu sendiri. (Madjid, 2016, p. 5)

Politik luar negeri suatu negara dapat berubah sewaktu – waktu atau dalam periode tertentu tergantung dari situasi dalam negeri. Beberapa faktor yang mempengaruhi politik luar negeri menurut William D. Coplin yaitu, konteks internasional, kondisi ekonomi dan militer, dan politik dalam negeri (Coplin, 1992). Seperti yang ditunjukkan dalam bagan dibawah ini bahwasannya proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, konteks internasional, politik dalam negeri dan ekonomi dan militer.



Bagan 1: Proses pengambilan kebijakan menurut William D Coplin

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang kemudian dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dengan menggunakan metode studi pustaka. Bahan yang diperoleh untuk mendukung data

penelitian ini berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sumber yang relevan dan terkait dengan objek studi yang diteliti.

Pembahasan

Isu pengungsi menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa untuk diselesaikan. Hal ini diakibatkan oleh masuknya pengungsi dari Suriah ke wilayah Eropa dengan jumlah yang banyak sehingga memunculkan krisis terbesar kedua paska perang dunia II pecah. Polandia merupakan salah satu negara yang menolak pengungsi untuk masuk ke negaranya. Hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, faktor domestik, faktor ekonomi dan faktor internasional.

Faktor Politik Domestik: Menguatnya Partai Kanan di Polandia

Menguatnya partai kanan di Polandia ditandai dengan kemenangan partai PiS pada pemilu legislative dan presiden di tahun 2015. Partai kanan yang berada di Polandia selain PiS yaitu, *United Poland (SP)*, *Prawica Rzeczypospolitej (Right Wing of the Republic)*, *Liberty (Wolnosc)*, *Congress of the New Right (KNP)*, *Real Politics Union (UPR)* dan *National Movement (RN)*. Akan tetapi partai yang mendominasi Polandia, yaitu PiS (*Law and Justice*) dan PO (*Civic Platform*) dengan ideologi tengahnya.

Partai *Law and Justice* (PiS), merupakan sebuah partai yang dipimpin oleh Lech Kazynsk dan Jaroslaw Kazynski, dengan ideologi partai kanan, nasional-

konservatif, dan Kristen-Demokratik yang berdiri pada tahun 2001. Agenda yang dijalankan oleh partai ini mencakup kesejahteraan sosial, sentimen Euroskeptik yang kuat dan keinginan kuat untuk “membuat Polandia hebat kembali” dengan mengandalkan teori-teori konspirasi (misal, bencana Smolensk² dilakukan oleh partai *Civic Platform*, dll.). Kebijakan yang dikeluarkan oleh PiS mencakup larangan ketat terhadap aborsi, fertilisasi in-vitro, pernikahan sesama jenis, meningkatkan pajak di sector keuangan/bank dan penutupan perbatasan bagi sebagian pengungsi dan pencari suaka khususnya dari Suriah.

Partai PiS memenangkan pemilu presiden pada bulan Oktober 2015 dalam dua putaran dengan skor akhir 51.55% (8,6 juta pemilih), sedangkan Civic Platform dengan kandidat presiden Bronislaw Komorowski 48.5% (8,1 juta pemilih). Jumlah keseluruhan pemilih dalam putaran pertama berjumlah 48,96 persen dari total pemilih yang terdaftar, sementara dalam putaran final tercatat sebanyak 55,34 persen.

Dalam pemilihan parlemen pada tahun 2015, PiS juga memenangkan pemilu ini dengan perolehan suara sebesar 37,58 persen (235 kursi dari 460). Kemenangan yang diperoleh PiS menjadi partai single pertama yang berkuasa di pemerintahan selama 25 tahun terakhir. Sementara partai oposisi *Civic Platform* mendapatkan suara

² Bencana Smolensk merupakan peristiwa jatuhnya pesawat Tu-154 yang menewaskan presiden Polandia Lech Kaczyński beserta 95 orang lainnya pada tahun 2010 saat menuju wilayah Smolensk, Rusia.

sebesar 24,09 persen (138 kursi). Hasil perolehan suara secara total mencapai 50,92 persen dari total penduduk yang terdaftar sebagai pemilih

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasannya Partai Law and Justice memiliki dominasi yang kuat dalam pemerintahan di Polandia. Dalam kaitannya dengan isu pengungsi dari Timur Tengah, partai ini sendiri menentang masuknya pengungsi untuk masuk ke negaranya. Karena dianggap sebagai pembawa wabah dan parasit. Polandia, seperti halnya negara bekas komunis CEE mengadvokasi solusi lokal untuk penyebab migrasi (Czach, 2018, pp. 46-47).

Kaczynski selaku pemimpin partai PiS melihat krisis pengungsi pada tahun 2015 sebagai sebuah momen dan menuntun ke arah menolak pengungsi untuk masuk ke Polandia. Hal ini dibuktikan dengan ucapan Kazynski yaitu:

“after recent events connected with actors of terror, [Poland] will not accept refugees because there is no mechanism that would ensure security” – (Czach, 2018, p. 52)

Selain menjadikan momen untuk menolak pengungsi untuk memasuki wilayah Polandia, Kaczynski memandang bahwasannya pengungsi yang memasuki Polandia dapat mengancam keberadaan penduduk Polandia. Dimana ia berpendapat bahwasannya:

“migrants carry all sorts of parasites and protozoa, which...while not dangerous in the organisme of these people, could be dangerous here.” – (Bimantara, 2018, p. 71)

Selain pendapat Kaczynski, Beata Szydlo selaku Perdana Menteri Polandia mengirimkan sebuah pesan terhadap member Uni Eropa lainnya pada masa inagurasi

yaitu, *“The issue of refugees is making us aware that the question of solidarity must be defined clearly. One cannot call attempts to export problems, which some countries have created without others’ participation, solidarity.”* – (The Conversation, 2015)

Tidak hanya itu saja, Presiden Polandia mengatakan bahwa pengungsi dapat membawa sebuah epidemic terhadap penduduk Polandia seperti kolera yang sudah menyebar di Yunani, sama halnya dengan disentri yang menyerang ibu kota Austria Vienna. Hal ini dapat dikatakan bahwa Polandia memang tidak ingin menerima pengungsi dari wilayah Timur Tengah dan memilih untuk fokus dalam masalah dalam negeri.

Faktor Ekonomi: Melemahnya Perekonomian Polandia

Polandia merupakan sebuah negara dengan tingkat perekonomian terbesar ke-6 di Uni Eropa dan terkenal dengan kebijakan makroekonominya yang ramah terhadap bisnis. Sejak tahun 1990, Polandia telah mengadopsi kebijakan liberalisasi ekonomi. Selama pertumbuhan ekonomi Polandia yang lambat pada tahun 2008-2009, Polandia merupakan satu-satunya negara Uni Eropa yang menghindari resesi, sebagai dikarekan kebijakan fiscal pemerintah yang longgar dikombinasikan dengan komitmen untuk mengendalikan pengeluaran dalam jangka menengah. Polandia merupakan negara penerima dana pembangunan terbesar di Uni Eropa dan siklus alokasi dana ini dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi di Polandia pada tahun 2014-2017 menunjukkan performa yang baik, dengan tingkat pertumbuhan GDP secara umum melebihi 3%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan dalam tingkat belanja sosial pemerintah yang berdampak pada meningkatnya tingkat belanja masyarakat.

Sejak tahun 2014 gelombang imigran yang berasal dari Ukraina memasuki Polandia. Setidaknya ada lebih dari satu juta warga negara Ukraina yang berada di Polandia, termasuk legal dan ilegal imigran. Masyarakat yang berasal dari Ukraina dibagi menjadi beberapa grup yaitu, migran pekerja, pelajar, profesional dan pebisnis, pengungsi tanpa status resmi, dan repatriates.

Masuknya imigran Ukraina ke Polandia tentunya membawa pengaruh besar bagi perekonomian Polandia. Dengan masuknya para pekerja dan pelajar yang berasal dari Ukraina tentunya menambah pundi-pundi ekonomi Polandia. Berkaitan dengan isu pengungsi yang berasal dari Timur Tengah. Polandia beranggapan jika pengungsi tersebut hanya ingin mendapatkan bantuan dari negara tanpa berkontribusi dalam membangun perekonomian Polandia selayaknya imigran Ukraina sehingga berakibat menambah beban pada perekonomian negara. Kemudian pemerintah Polandia telah melaksanakan tugasnya dalam menerima pengungsi dalam konteks ini yaitu warga Ukraina, sehingga tidak dapat lagi menerima pengungsi dari negara lain untuk masuk ke negaranya (Morath, 2017).

Ada beberapa argument yang mengatakan jika menangani pengungsi akan memakan biaya yang banyak dan juga pengungsi akan membuat pasar tenaga kerja Polandia kelebihan beban dimana warga setempat dapat kehilangan pekerjaannya dan meningkatkan tingkat pengangguran di Polandia. Hal ini dikarenakan banyaknya imigran yang berasal dari Ukraina masuk ke Polandia jika ditambah dengan pengungsi masuk akan menambah beban serta jatuhnya perekonomian Polandia. Seperti yang dikemukakan oleh seorang pengamat politik Kazimierz Kik, *“In terms of GDP Poland has grown rich but many Poles have grown poorer”*. Dapat dikatakan Polandia memang negara terbesar ke-enam perekonomiannya di Uni Eropa akan tetapi tidaklah semaju Jerman. Oleh karena itu Polandia menolak pengungsi untuk masuk ke negaranya (Morath, 2017).

Faktor Internasional: Pengaruh Islamophobia di Eropa Bagi Polandia

Paska tragedi WTC 11 September 2001 di New York dan ajakan untuk memerangi terorisme, komunitas muslim seolah menjadi isu yang perlu dibahas. Komunitas muslim dianggap sebagai pemicu dari suatu permasalahan dan menjadi sasaran tuduhan. Sehingga muncullah sebuah istilah di kalangan masyarakat barat yaitu, Islamophobia. Dimana islamophobia merupakan sebuah bentuk kecemasan atau ketakutan terhadap komunitas muslim yang ada di seluruh dunia yang berdampak pada diskriminasi terhadap suatu komunitas. Islamophobia berkembang begitu pesat setelah banyaknya pemberitaan di televisi maupun social media mengenai komunitas muslim

identik sebagai orang yang kasar, mendukung adanya terorisme dan katalis terhadap konflik yang ada di dalam masyarakat (Alshammari, 2013, p. 178).

Setelah terjadinya serangan bom Paris dan Jerman mengakibatkan munculnya fenomena islamophobia di Kawasan Eropa. Salah satu fenomena islamophobia juga menyebar di negara Polandia. Menurut studi yang dilakukan oleh *the national studies* yang bekerja sama dengan peneliti *pan-Europe*, ketakutan Islam dan Muslim di Polandia faktanya lebih besar daripada negara di Eropa lainnya yang memiliki jumlah populasi muslim yang banyak. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh *the German Friedrich Ebert Stiftung* sebanyak 47% penduduk Polandia percaya bahwa banyak sekali penduduk muslim yang tinggal di Polandia (Pedziwiatr, 2016).

Sebanyak 62% penduduk Polandia percaya bahwa Islam adalah agama yang intoleran dan hanya 5 orang yang percaya jika kebudayaan muslim dapat diadopsi ke dalam kehidupan masyarakat Eropa/Polandia. Dengan perbandingan negara Jerman yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar kedua di Eropa, sebanyak 52% masyarakat Jerman percaya bahwa Islam adalah agama yang intoleran, Britania Raya sebanyak 39%.

Meningkatnya statement anti-Islam di kalangan publik Polandia pada tahun 2015 akibat dari paska serangan teroris di kantor Charlie Hebdo di Paris dan juga krisis pengungsi yang terjadi di Eropa. Isu islamophobia diangkat oleh partai populis nasional konservatif PiS, KORWiN dan grup partai kanan yang tergabung dalam Kukiz'15 selama masa kampanye pemilihan parlemen. Isu krisis pengungsi terus digunakan oleh

partai PiS setelah memenangkan pemilu parlemen dan beberapa anggota dari Kukiz'15 untuk menakuti masyarakat Polandia terkait kemungkinan masuknya Muslim ke negara setelah pemilihan. Serangan teroris di Paris pada 13 November 2015 memberikan sebuah argument baru. Dimana Menteri Urusan Eropa Law and Justice yang akan datang memberikan statement:

“Di hadapan kejadian tragis yang menimpa Paris, Polandia tidak melihat adanya kemungkinan untuk mengimplementasikan keputusan untuk merelokasi pengungsi.”

Dilihat dari statement ini dapat di garis bawahi bahwa Polandia tidak ingin menerima pengungsi sesuai dengan skema relokasi yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya. Pada saat pemilu presiden di tahun yang sama, isu terhadap pengungsi dari Suriah juga diangkat dalam debat calon presiden di salah satu TV swasta Polandia, namun hal ini hanya isu minoritas. Tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat Suriah dalam debat presiden dilihat dari sudut pandang nasib pengungsi kristen.

Perlu digaris bawahi bahwasannya Polandia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Katolik/Nasrani. Dimana nilai-nilai kristen sangat kental dengan kehidupan masyarakatnya yang tentunya memiliki perbedaan nilai-nilai yang dibawa oleh pengungsi yang beragama muslim. Seperti yang dikemukakan oleh Blaszcak yang merupakan mantan Menteri Dalam Negeri Polandia menganggap bahwasannya menerima satu pengungsi ke dalam negeri dapat mengubah Polandia menjadi sarang teroris. Hal ini secara terang-terangan menganggap bahwa pengungsi muslim semuanya adalah teroris.

“letting even a single refugee into the country would risk turning it into a breeding ground for terrorists. Poland must therefore defend the continent’s Christian civilization from the Islamic fighters who threaten to kill us.” – (Bimantara, 2018, pp. 71-72)

Ketakutan akan muslim atau Islam di Polandia mengakibatkan Polandia memilih untuk menolak mereka karena alasan keamanan dan juga untuk mempertahankan nilai-nilai kristen di negaranya. Akan tetapi terbuka bagi pengungsi Timur Tengah yang memiliki kesamaan agama dengan penduduk Polandia.

Kebijakan Uni Eropa Yang Kurang Efektif

Kebijakan relokasi pengungsi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa memiliki tujuan untuk mengurangi beban negara yang berada di garis depan seperti, Italia dan Yunani yang mengalami tekanan migrasi yang datang ke negaranya. Relokasi dalam konteks disini ialah pendistribusian pengungsi ke negara-negara anggota yang jelas membutuhkan perlindungan internasional. Hal ini terbagi ke dalam empat kriteria yaitu:

- Jumlah penduduk (40%)
- Total GDP (40%)
- Jumlah permohonan suaka dan jumlah pengungsi yang ditempatkan kembali per 1 juta penduduk selama periode 2010-2014 (10%)
- Rata-rata pengangguran (10%)

Pada 27 Mei 2015, Komisi mengajukan proposal untuk merelokasi 40.000 pengungsi. Italia dan Yunani. Kemudian, pada bulan September di tahun yang sama,

Komisi kembali mengajukan proposal untuk merelokasi sebanyak 120.000 orang dari Italia, Yunani dan Hungaria untuk 2 tahun kedepan. Sehingga total pengungsi yang nantinya akan direlokasi ke negara anggota sebanyak 160.000 pengungsi. Selain adanya alokasi sesuai kuota yang ditentukan, bagi negara yang menerima pengungsi mendapatkan € 6,000 untuk setiap orangnya. Sedangkan untuk wilayah Italia, Yunani dan Hungaria mendapatkan €500 untuk setiap orang direlokasi sebagai biaya transportasi.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ini mendapat respon yang kurang memuaskan dari Polandia. Dimana Polandia menolak untuk menerima pengungsi sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh Uni Eropa. Setidaknya Polandia harus menerima sekitar 5.082 orang, 1.201 dari Italia dan 3.381 dari Yunani. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh factor politik domestic. Dimana partai yang berkuasa yaitu partai *Law and Justice* yang sangat kontra dengan keberadaan pengungsi. Selain kontra dengan keberadaan pengungsi, pemerintahan *Law and Justice* menyalahkan pemerintahan sebelumnya yaitu, *Civic Platform* dan *PSL* yang menerima rencana relokasi dibawah naungan Uni Eropa pada tahun 2015 seperti yang diungkapkan oleh Mariusz Blaszczack, “*In agreeing to take in refugees, the (previous government) put a ticking bomb under us*”. “*We’re defusing that bomb*” (Bimantara, 2018, p. 70). Akan tetapi Polandia juga menganggap bahwa kebijakan relokasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tidak efektif. Dimana dari 160.000 pengungsi yang akan direlokasi tidak

menembus angka 1000 pengungsi pada tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 (Duszczuk, 2016).

Konsep relokasi sendiri tidak dapat bekerja karena beberapa factor. Pertama, hal ini membebankan negara anggota lainnya. Kedua, pada dasarnya pengungsi dapat memilih negara yang ingin dikunjungi atau disinggahi. Dengan konsekuensi wilayah yang paling populer yaitu Jerman atau Swedia, dimana kedua negara tersebut sudah menerima banyak pengungsi untuk masuk ke negaranya. Ketiga, meskipun pengungsi/migran pergi ke Polandia atau Republik Ceko, dapat diasumsikan jika mereka akan tinggal dalam periode singkat dan memilih untuk pergi ke Jerman. Sebuah konsep yang berkembang di Polandia terkait solusi terhadap relokasi pengungsi yaitu, mengubahnya menjadi system relokasi berbasis volunteer. Sehingga negara bebas dalam menentukan apakah pengungsi tersebut dapat masuk ke negaranya daripada harus mengurung pengungsi dalam sebuah kamp. (Duszczuk, 2016).

Selain dirasa kurang efektif, adanya perubahan pada proses pembuatan kebijakan tentang pencari suaka pada tingkat Uni Eropa secara langsung mempengaruhi negara anggota lainnya. Uni Eropa sebelumnya mengkategorikan isu migrasi sebagai isu *intergovernmental* menjadi berbasis integritas komunitas Eropa, dengan menggunakan system pemilihan suara mayoritas (QMV). Sehingga negara yang suaranya tidak merepresentasikan suara mayoritas, merasa kepentingannya tidak penting atau dijadikan pertimbangan pada level supranasional di Uni Eropa. Kemudian, hal ini mengakibatkan munculnya dua kategori negara anggota dan memperdalam jarak

antara Uni Eropa dan negara anggota. Sebagaimana sebuah negara membentuk aliansi dengan negara lain untuk memperkuat statementnya menolak kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa. Dalam hal ini Polandia membentuk aliansi dengan Republik Ceko, Hungaria dan Slovakia yang dikenal dengan *Visegrad Four* (V4) untuk mengekspresikan penolakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

Sehingga dapat dikatakan, dengan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah Polandia saat ini dengan Uni Eropa menjadi suatu alasan Polandia menolak pengungsi untuk memasuki wilayahnya. Dimana pemerintah Polandia pada saat ini menilai bahwa masalah migrasi seharusnya diselesaikan oleh masing-masing negara sehingga Polandia mendukung solusi berbasis lokal dan keputusan berada di tangan negara itu sendiri, sedangkan Uni Eropa menilai bahwa masalah migrasi ini merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan dengan membentuk kebijakan-kebijakan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan negara tersebut (Czach, 2018, pp. 53-55).

Kesimpulan

Krisis pengungsi yang diakibatkan tidak stabilnya situasi politik di Suriah mengakibatkan banyaknya laju pengungsi masuk ke Eropa. Hal ini merupakan krisis terburuk kedua setelah paska perang dunia kedua terjadi. Polandia menolak pengungsi dari Timur Tengah masuk ke negaranya pada tahun 2015 karena adanya tiga factor, yaitu domestic, ekonomi dan konteks internasional. Dalam faktor domestic adanya

pergantian kekuasaan partai yang ada di Polandia yaitu, partai Law and Justice dengan Presiden Andrej Duda. Partai ini merupakan partai yang memiliki ideologi kanan dan disebut partai populis nasional konservatif, euroskeptis yang mana sangat menentang untuk pengungsi masuk ke dalam negaranya serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi keputusan Polandia dalam menanggapi krisis pengungsi ini. Hal ini dilihat dari banyaknya laju imigran yang berasal dari Ukraina yang ingin bekerja di Polandia. Tidak hanya itu saja pandangan negative terhadap pengungsi yang hanya ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga nantinya berdampak dalam penambahan beban perekonomian Polandia.

Faktor internasional yang mempengaruhi pemerintah Polandia dalam menolak pengungsi dari Timur Tengah pada tahun 2015. Dalam konteks ini dibagi menjadi dua hal yaitu, kebijakan Uni Eropa dan islamophobia. Pengaruh islamophobia yang menyebar di Kawasan Eropa mengakibatkan munculnya sentiment anti-Muslim di kalangan masyarakat serta elit politik di Polandia. Dimana masyarakat dan pemerintah memandang negative pengungsi muslim yang berasal dari Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena adanya ketakutan hilang/rusaknya nilai-nilai Kristen yang menyebar di Polandia sehingga untuk melindungi itu pemerintah Polandia menolak pengungsi muslim dari Timur Tengah akan tetapi terbuka bagi pengungsi yang beragama Nasrani. Kebijakan relokasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dianggap kurang efektif oleh pemerintah Polandia dalam menangani krisis pengungsi.

Dibuktikan dengan tidak mencapainya kuota yang ditentukan hingga pertengahan tahun 2016. Selain itu, adanya system QMV yang tidak mempresentasikan kepentingan negara anggota dalam merespon suatu keputusan sehingga memunculkan jurang yang dalam antara Uni Eropa dan Negara Anggota karena perbedaan tersebut.

Daftar Pustaka

- Alshammari, D. (2013). Islamophobia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(15), 177-180.
- Amaliyah, N. (2015). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi . *Skripsi S1*, 20.
- Avissa, T. P. (2017). *Kebijakan Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015-2016*. Retrieved from UMY Repository : <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12289>
- Bimantara, B. R. (2018). *Inkonsistensi Polandia Dalam Merespon Krisis Pengungsi di Eropa*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Coplin, W. D. (1992). *Foreign Policy Decision-Making*. Learning Research Inst for Intl.
- Czach, C. (2018). *"Law and Justice?" Understanding Poland's asylum policy through the lens of Europeanization*. Ottawa: University of Ottawa.
- Duszczuk, M. (2016, June 15). *The Polish perspective on European refugee policy*. Retrieved January 12, 2019, from Heinrich Boll Stiftung: The Green Political Foundation: <https://www.boell.de/en/2016/06/15/polish-perspective-european-refugee-policy>
- Eurostat. (2015). *Asylum in the EU The number of asylum applicants in the EU jumped to more than 625 000 in 2014 20% were Syrians*. Eurostat. Retrieved from Eurostat.
- IMF. (2018). *Report for Selected Countries and Subjects*. Retrieved January 11, 2019, from IMF: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=1980&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=964&s=NGDP_RPCH,PPPGDP,PPPPC,PCPIPCH,LUR,GGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr.x=39&pr.y=12
- Ivanov, D. (2015). *Legislation on emergency relocation of asylum-seekers in the EU*. European Union.
- Kaczmarczyk, P. (2014). *Recent Trends in International Migration in Poland The 2012 SOPEMI Report*. Polandia: Central Migration Papers.
- Koszykowska, P. J. (2018). *The Rise of Right-Wing Populism in Poland: Comparative Analysis of Social Structure and Party Strategy*. New York: CUNY Academic Works.

- Madjid, W. P. (2016). *Politik Luar Negeri dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta.
- Morath, A. (2017, June 14). *'Poland for the Polish'? Taking a Closer Look at the Polish Rejection of Refugees*. Retrieved January 12, 2019, from Heinrich Boll Stiftung European Union: <https://eu.boell.org/en/2017/06/14/poland-polish-taking-closer-look-polish-rejection-refugees>
- Ostrand, N. (2015). The Syrian Refugee Crisis: A Comparison of Responses by Germany, Sweden, the United Kingdom, and the United States. *Journal on Migration and Human Security*, 3(3).
- Pedziwiatr, K. (2016). *Islamophobia in Poland: National Report 2015*. European Islamophobia Report.
- Sabic, S. S. (2017). *The Relocation of Refugees in the European Union*. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung.
- The Conversation. (2015, November 23). *Why Poland's new government is a problem for migrants to the EU*. Retrieved January 11, 2019, from The Conversation: <https://theconversation.com/why-polands-new-government-is-a-problem-for-migrants-to-the-eu-51005>
- USA for UNHCR. (2017). *What is Refugees?* Retrieved from USA for UNHCR: <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/>